

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMBATALAN  
PERJANJIAN PERKAWINAN SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI PASAL 1365 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Shulthon Harun Al Rasyid**

**201810115009**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Pembatalan Perjanjian Perkawinan  
Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan  
Hukum Ditinjau dari Pasal 1365 Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata

Nama Mahasiswa : Shulthon Harun Al Rasyid

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115009

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 22 Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Diana Fitriana, S.H., M.H.  
NIDN. 0424039003

Pembimbing II



Rama Dhianty, S.H., M.H.  
NIDN. 0303107304

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembatalan Perjanjian Perkawinan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nama Mahasiswa : Shulthon Harun Al Rasyid

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115009

Program Studi/Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, 22 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Pengaji : Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Pengaji I : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Pengaji II : Gede Aditya Pratama, S.H., LL.M.

NIDN.0314088901

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., M.H.  
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM  
NIDN. 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shulthon Harun Al Rasyid  
NPM : 201810115009  
TTL : Bekasi, 14 April 1999  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembatalan Perjanjian Perkawinan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 22 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Shulthon Harun Al Rasyid**  
**NPM. 201810115009**

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shulthon Harun Al Rasyid

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115009

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 14 April 1999

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Shulthon Harun Al Rasyid**

**NPM. 201810115009**

## ABSTRAK

**Shulthon Harun Al Rasyid. 201810115009. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembatalan Perjanjian Perkawinan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Perkawinan merupakan perbuatan hukum mempunyai akibat hukum yaitu persatuan harta yang didapat dalam perkawinan. Ketentuan persatuan harta dapat disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan, seperti dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pelaksanaan perjanjian perkawinan terbentur dengan kecaburan norma mengenai sahnya perkawinan dan waktu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dua hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi perlindungan hukum pada perjanjian perkawinan, sehingga dijadikan dasar bagi pihak yang tidak beriktiad baik untuk melanggar hukum perkawinan, seperti dalam Beberapa kasus dalam skripsi ini. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum bagi pembatalan perkawinan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum dan perlindungan hukum dari perjanjian perkawinan terhadap para pihak dalam perkawinan, terkait dengan kecaburan peraturan mengenai keabsahan perjanjian perkawinan.

Jenis penelitian adalah Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Kasus. Metode pengumpulan bahan hukumnya adalah Studi Kepustakaan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku dan memberikan perlindungan hukum pada saat perkawinan sudah dicatatkan, karena akta perkawinan merupakan bukti otentik yang menjamin kepastian hukum bagi suami dan istri. Perjanjian perkawinan secara objektif memberikan perlindungan bagi pihak yang memiliki harta kekayaan lebih banyak. Bagi pihak yang lemah secara ekonomi, perjanjian perkawinan dapat dijadikan sarana perlindungan hukum dengan cara melakukan perluasan isi perjanjian perkawinan dengan mencantumkan hal-hal yang dimungkinkan terjadi dalam perkawinan. Adapun saran yang diberikan penulis kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang terkait dengan perjanjian perkawinan adalah perlunya pengkajian kembali mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar tidak menimbulkan multi tafsir.

**Kata kunci:** Perjanjian Perkawinan, Perlindungan Hukum, Perkawinan, Pembatalan Pejanjian

## ABSTRACT

**Shulthon Harun Al Rasyid.201810115009.** Legal Protection Against Victims of Cancellation of Unilateral Marriage Agreements as an Unlawful Act Judging from Article 1365 of the Civil Code.

*Marriage is a legal act that has legal consequences, namely the union of assets obtained in marriage. The provisions for the union of assets can be deviated by making a marriage agreement, as in Article 29 of Law Number 1 of 1974. The implementation of the marriage agreement is hampered by the ambiguity of the norms regarding the validity of the marriage and the time when the marriage agreement is made. These two things are closely related to the implementation of the legal protection function in the marriage agreement, so that it is used as the basis for parties who do not have good intentions to violate marriage law, as in several cases in this thesis. The formulation of the problem is what are the legal consequences and legal protection for the annulment of marriage. The purpose of this paper is to find out, understand and analyze the legal consequences and legal protection of the marriage agreement on the parties to the marriage, related to the ambiguity of the regulations regarding the validity of the marriage agreement.*

*This type of research is normative legal research with a legal approach and a case approach. The method of collecting legal materials is library research. From the results of the study, it is known that the marriage agreement comes into force and provides legal protection when the marriage has been registered, because the marriage certificate is authentic evidence that guarantees legal certainty for husband and wife. The marriage agreement objectively provides protection for those who have more assets. For parties who are economically weak, a marriage agreement can be used as a means of legal protection by expanding the contents of the marriage agreement by including things that are possible in marriage. The advice given by the author to the government and legislators related to marriage agreements is the need for a re-examination of the provisions of marriage agreements in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, so as not to cause multiple interpretations.*

**Keywords:** Marriage Agreement, Legal Protection, Marriage, Cancellation of Agreement

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayangnya yang selalu melimpah terhadap penulisan skripsi ini. Penulisan ini mengangkat skripsi ini dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Diana Fitriana S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Rama Dhianty, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan kontibusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluangkan untuk membimbing saya.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan pelayanan demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Bapak Munjiat dan Ibu Siti Junaenah. Terimakasih yang tak terhingga untuk dukungan, motivasi, kerja keras serta pengorbanan untuk

anak terakhir dalam mengasuh hinggadetik ini dan juga doa-doa yang telah dipanjatkan yang membawa anaknya sampai ketitik sekarang ini.

10. Kakak saya yaitu Wildan Abdul Aziz, Gabriella Jabir dan Maria Ulfa yang selalu memberikan motivasi, dukungan moril dan doanya selama ini.
11. Ari Warningsih, S.H. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar PT.Mercury Tekindo InternusaTerimakasih atas dukungan dan dorongan moril untuk saya selama ini.
13. Teman-teman Kelas C1 sebagai teman seperjuangan yang telah menitih awal perkuliahan hingga saat ini dan besar harapan kita semua untuk lulus bersama dan tentunya sukses bersama.

Penulis pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, masukan serta kritik yang berguna agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan.

Bekasi, 21 Juli 2022

Penulis,



**Shulthon Harun Al Rasyid**

NPM. 201810115009

## DAFTAR ISI

<b>COVER.....</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	xiii
<b>MOTTO .....</b>	xiv
<b>BAB I.....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan masalah .....	11
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	11
1.2.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Dan Manfaat .....	12
1.3.1 Tujuan penelitian.....	12
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	12
1.4 Kerangka Teoritis Konseptual dan Pemikiran .....	13
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	13
1.4.2 Kerangka Konseptual .....	14
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	17
1.5 Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II .....</b>	19
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	19
2.1 Teori Perlindungan Hukum.....	19
2.1.1 Pengertian Teori Perlindungan Hukum.....	19

2.2 Teori Kepastian Hukum .....	22
2.2.1 Pengertian Teori Kepastian Hukum .....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	23
2.3.1 Pengertian Perjanjian .....	23
2.3.2 Syarat-syarat Sah Perjanjian .....	25
2.3.3 Unsur-Unsur Perjanjian.....	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	32
2.4.1 Pengertian Perkawinan.....	32
2.4.2 Syarat-syarat Sah Perkawinan.....	33
2.4.3 Tujuan Perkawinan .....	37
2.5 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum.....	37
2.5.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	37
2.5.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	39
<b>BAB III.....</b>	<b>41</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Metode Penelitian .....	41
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	41
3.2.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2.2 Pendekatan penelitian .....	42
3.2.3 Sumber Bahan Penelitian .....	43
3.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian .....	43
3.4 Teknik pengolahan dan analisis data .....	44
3.4.1 Teknik Pengolahan data .....	44
3.4.2 Teknik analisis data.....	45
<b>BAB IV .....</b>	<b>47</b>
<b>HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
4.1 Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Perkawinan Memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum Menurut 1365 KUHper .....	47
4.2 Perlindungan hukum korban pembatalan perjanjian perkawinan menurut pasal 1365 KUHper.....	57
<b>BAB V .....</b>	<b>70</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
5.1 KESIMPULAN.....	70

5.2 SARAN .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
RI	Republik Indonesia
UU RI	Undang-Undang Republik Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KEPPRES	Keputusan Presiden
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
PMH	Perbuatan Melawan Hukum



## MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.” – Imam Syafi’i

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” – QS Ar Rad 11

